

Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Ferica Christinawati Putri^{1*}

¹Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, Indonesia

Email : 1*ericacputri@borneo.ac.id

(*: corresponding author)

Abstrak– Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah sebagai wujud akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Objek penelitian yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja belanja daerah berdasarkan rasio pertumbuhan dan keserasian dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020-2021. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Dari hasil analisis yang terdiri dari analisis menggunakan rasio pertumbuhan dan keserasian menunjukkan hasil bahwa terjadi pertumbuhan positif pada kinerja belanja daerah dan orientasi kinerja belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu pada kegiatan operasional sebesar 86,41% daripada kegiatan belanja modal yaitu 8,67%.

Kata Kunci: Rasio Belanja Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian

Abstract– Budget Realization Reports (LRA) published by regional governments as a form of regional government accountability in providing information that is very useful for users of regional financial information to assess regional financial performance. LRA is one of the main regional financial accountability reports. Regional spending reflects local government policies and the direction of regional development. The object of research is the Provincial Government of DKI Jakarta. The aim of the study was to analyze the performance of regional spending based on the ratio of growth and compatibility in the Budget Realization Report (LRA) for the Provincial Government of DKI Jakarta for the 2020-2021 fiscal year. The analytical method used is descriptive analysis method which is carried out by making a description of the problems that have been identified. From the results of the analysis which consists of analysis using growth and compatibility ratios, it shows that there is positive growth in the performance of regional expenditures and the orientation of the expenditure performance of the DKI Jakarta Provincial Government on operational activities of 86.41% compared to capital expenditure activities of 8.67%.

Keywords: Regional Spending Ratio, Growth Ratio, Harmony Ratio

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri sebagai akibat dari otonomi daerah. Pemerintah daerah harus siap memikul beban pengelolaan sumber daya dan sumber pendanaan yang ada dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan sebagai konsekuensi dari melaksanakan otonomi daerah (Aini et al., 2020).

Untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah maka diperlukan pengukuran kinerja keuangan (Wirawan Suhaedi, 2019). Pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya melalui beberapa cara salah satunya melalui pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, administrasi atau pelaporan akuntansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari ikut andil pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya. Selain itu, dengan mengelola keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerahnya untuk membiayai belanja daerah serta menunjukkan bahwa uang atau dana masyarakat telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis (Amelia, 2022).

Tujuan utama entitas pemerintah adalah proses pelayanan publik. Inilah yang membedakan dengan perusahaan. Keuntungan finansial bukanlah tujuan utama pemerintah dalam hal ini, melainkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, strategi menghasilkan laba yang tinggi dalam organisasi bisnis dengan meningkatkan pendapatan dan memangkas belanja/biaya mungkin tidak selalu dapat diterapkan pada pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Selain itu, instrumen penting dalam menstimulus perekonomian daerah adalah belanja pemerintah. Berbeda dengan perusahaan yang manajemennya diharapkan dapat menekan belanja/biaya seminimal mungkin, kepala daerah di pemda diminta untuk membelanjakan dana yang dikelolanya seefisien mungkin karena sebagian dari belanja tersebut juga berdampak pada masyarakat (Halim & Iqbal, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2006, laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran membandingkan antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran dan realisasi periode sebelumnya. LRA menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode tertentu.
- b. Neraca
Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan pemerintah termasuk aset, utang, dan ekuitas dana, pada tanggal tertentu. Neraca membandingkan aset, utang, dan ekuitas dana dengan periode sebelumnya.
- c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar yang terjadi selama satu periode tertentu. Arus kas masuk dan keluar diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan pembiayaan/pendanaan, dan arus kas dari kegiatan investasi. Pengguna laporan keuangan dapat mengestimasi kapasitas entitas untuk membentuk kas dan setara kas serta kebutuhannya akan arus kas dengan menggunakan informasi terkait arus kas.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan laporan keuangan merupakan bagian yang merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan yang menyajikan informasi terkait penjelasan pos-pos laporan keuangan dengan tujuan memberikan informasi pengungkapan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 menyatakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

Informasi dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat berguna untuk menilai kinerja keuangan suatu daerah. LRA lebih diprioritaskan bila dibandingkan dengan neraca. LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah pertama yang diperlukan sebelum menyusun laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran melayani fungsi penting dalam hal distribusi, stabilisasi, alokasi sumber daya publikasi, perencanaan dan pengendalian organisasi, serta evaluasi kinerja. Oleh karenanya, salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling penting adalah LRA. Pembaca laporan dapat melakukan analisis pendapatan, analisis pendapatan, dan analisis keuangan berdasarkan LRA (Haryanto et al., 2007).

Menurut (Donaldson & Davis, 1991), Gagasan yang mendeskripsikan suatu kondisi dimana untuk kepentingan organisasi (*principal*), manajer (*steward*) lebih berkonsentrasi pada tujuan hasil utama mereka dan tidak terpengaruh oleh tujuan pribadi mereka merupakan konsep dari teori *Stewardship*. Dengan demikian, teori ini tepat digunakan untuk melakukan riset pada lembaga pemerintah provinsi/daerah.

Menurut gagasan *stewardship*, manusia pada dasarnya mampu bertindak secara bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, dan memiliki integritas tinggi. Menurut *stewardship*, manajemen dipandang sebagai pihak yang mampu mengambil langkah-langkah terbaik yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan stakeholders (Angelina et al., 2020). Berdasarkan teori *stewardship*, kinerja perusahaan dan kesuksesan organisasi saling berkaitan erat. Dengan memanfaatkan kinerja

perusahaan, *stewardship* akan melakukan upaya optimalisasi kekayaan untuk melindungi organisasi guna memaksimalkan fungsi utilitas (Setiani & Ismunawan, 2022).

Dalam organisasi di sektor publik, *stewardship theory* dapat digunakan sebagai model. Secara umum, akuntansi organisasi sektor publik sangat berguna dalam pemenuhan kepentingan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi berperan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah. Pengelolaan sumber daya baik berupa keuangan maupun sumber daya manusia dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi sebagai standar pelaporan (Angelina et al., 2020).

Dapat dikatakan bahwasanya teori *stewardship* pada hakikatnya menguraikan bagaimana Pemda Provinsi DKI Jakarta sebagai suatu instansi/lembaga dapat diandalkan dan ikut berperan serta dalam mengutamakan kepentingan umum melalui rencana kerjanya, dengan ruang lingkup mewujudkan akuntabilitas keuangan yang telah diamanatkan oleh instansi/ lembaga tersebut. Dengan demikian, tujuan instansi/lembaga tersebut dapat terlaksana dengan baik dalam hal meningkatkan perekonomian, kesejahteraan publik, dan standar pelayanan publik. Dapat dikatakan jika usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan realisasi pendapatan daerah berhasil, tentu akan terjadi peningkatan belanja daerah. Sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mengatur pengeluaran belanja secara efektif dan efisien (Abbas et al., 2020).

Implikasi dari *Stewardship Theory* dalam riset ini adalah untuk menjelaskan keberadaan Pemprov DKI Jakarta sebagai instansi yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada publik, menampung aspirasi publik, dapat dipercaya oleh publik, dan bertanggung jawab mengenai transparansi keuangan yang telah diserahkan kepada pemerintah, sehingga kesejahteraan masyarakat dan tujuan perekonomian dapat tercapai secara optimal (Syifa et al., 2021).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Mengingat merupakan salah satu provinsi yang memiliki otonomi penuh atas penyelenggaraannya, maka memandang perlunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan khususnya laporan realisasi anggaran (LRA). Berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2021 terjadi peningkatan anggaran baik pendapatan maupun belanja. Oleh karena itu, perlu dilakukannya analisis belanja pada Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2021.

2. METODE

2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun anggaran 2020-2021 yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat referensi penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan *website*.

2.2 Tempat Penelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian tidak berpusat di satu tempat karena data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh melalui *website* resmi PPID DKI Jakarta.

2.3 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian analisis deskriptif adalah desain penelitian yang menggambarkan secara sistematis mengenai informasi ilmiah yang berasal dari objek/subjek penelitian (Abdullah, 2015). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan memasukkan angka-angka sebagai komponen ke dalam rumus analisis belanja daerah. Untuk menilai apakah APBD telah digunakan oleh pemerintah secara efektif, efisien, dan ekonomis maka perlu dilakukan analisis belanja daerah (Sholikhah & Priyono, 2022). Mahmudi menyatakan dalam (Fathiyah et al., 2021) bahwa analisis belanja daerah digunakan untuk menilai tingkat efisiensi anggaran yang ditempuh oleh pemerintah daerah, meminimalkan belanja yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran. Jika realisasinya lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang

mencerminkan adanya efisiensi anggaran, maka kinerja anggaran belanja daerah dapat dikatakan baik (Aisah, 2018). Analisis belanja dapat dilakukan dalam bentuk analisis pertumbuhan belanja dan analisis rasio keserasian sesuai informasi dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2.3.1 Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

Sesuai dengan proses penelitian yang telah dikemukakan yang dilakukan seperti yang diperlihatkan pada Gbr 2 maka hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Analisis rasio pertumbuhan belanja dapat digunakan untuk menentukan apakah belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah telah meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Jika pertumbuhan pendapatan tidak diimbangi dengan pertumbuhan belanja maka kesehatan fiskal daerah dan keseimbangan dapat terganggu dalam jangka menengah (Amelia, 2022).

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui tingkat kerasionalan dan pertanggungjawaban dari pertumbuhan masing-masing belanja. Analisis pertumbuhan belanja berguna untuk memahami bagaimana perubahan perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Belanja umumnya memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Kenaikan belanja didasarkan atas alasan terkait penyesuaian inflasi, perubahan cakupan layanan yang diberikan, perubahan kurs rupiah, dan penyesuaian kondisi ekonomi makro. Pemerintah daerah harus mampu melakukan penghematan anggaran, mengendalikan belanja daerah, dan meningkatkan efisiensi belanja dalam kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah (Soleh, 2015).

Rasio pertumbuhan belanja dapat dihitung menggunakan formula berikut ini:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

2.3.2 Analisis Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menjelaskan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya secara optimal baik untuk belanja operasi maupun belanja modal. Keserasian belanja menggambarkan pengalokasian belanja secara keseluruhan sesuai dengan tuntutan rencana kerja anggaran yang sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah.

Menurut (Hasanah & Vidiyastutik, 2018) "Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan peran anggaran sebagai fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi belanja agar fungsi anggaran berjalan secara optimal."

Rasio keserasian terdiri dari rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi dapat dihitung menggunakan formula berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menggambarkan persentase pengalokasian belanja daerah untuk belanja operasi. Secara umum, persentase antara 60-90% untuk belanja operasional mendominasi total belanja daerah (Sholikhah & Priyono, 2022). Belanja operasi bersifat jangka pendek dan pada kondisi tertentu bersifat teratur atau berulang karena manfaatnya habis dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Adapun mengenai rasio belanja modal dapat dihitung menggunakan formula berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah biasanya berkisar antara 5-20%. Rasio ini bersifat rutin dan manfaat belanjanya lebih dari satu tahun. Rasio belanja modal ini berdampak pada neraca yaitu menambah aset daerah.

Dibandingkan dengan pemda dengan pendapatan tinggi, pemda yang memiliki tingkat pendapatan daerah rendah biasanya memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan pemda dengan pendapatan tinggi biasanya memiliki aset modal yang cukup, sedangkan pemda dengan pendapatan rendah biasanya melakukan belanja modal sebagai bagian dari modal investasi jangka panjang (Amelia, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dengan luas daratan 661,52 km² dan 6.977,5 km² lautan, Provinsi DKI Jakarta memiliki sekitar 110 pulau yang tersebar di antara Kepulauan Seribu. Secara administratif, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima kotamadya dan satu kabupaten administratif antara lain: Jakarta Pusat yang memiliki luas daratan 47,90 km², Jakarta Utara memiliki luas daratan 154,01 km², Jakarta Barat memiliki luas daratan 126,15 km², Jakarta Selatan memiliki luas daratan 145,73 km², Jakarta Timur memiliki luas daratan 187,73 km², dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Nama Jakarta pernah mengalami banyak perubahan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Jakarta melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Istilah “Pemerintah Daerah” diubah menjadi “Pemprov DKI Jakarta” melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah provinsi khusus ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta, dengan otonominya tetap di tingkat provinsi dan bukan di wilayah kota.

3.2 Visi & Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Visi Pemprov DKI Jakarta, yaitu: Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Adapun misi Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebagai berikut:

- Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
- Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- Menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

3.3 Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja TA 2020/2021

Tabel 1. Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja TA 2020/2021

| Tahun | Realisasi Belanja Tahun $t-1$ | Realisasi Belanja Tahun t | Kenaikan/ Penurunan | % |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 2019-2020 | 64.099.287.469.013 | 51.716.860.929.662 | (12.382.426.539.351) | -19,32% |
| 2020-2021 | 64.099.287.469.013 | 61.231.460.250.253 | 3.514.599.320.591 | 6,09% |

Sumber : PPID DKI JAKARTA (Diolah 2023)

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 1 dapat diperoleh kesimpulan untuk tahun anggaran 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu dengan persentase sebesar -19,32%. Namun, untuk tahun anggaran 2021 terjadi peningkatan atau dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang positif dengan persentase sebesar 6,09%.

3.4 Analisis Rasio Keserasian TA 2020/2021

3.4.1 Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tabel 2. Analisis Belanja Operasi TA 2020/2021

| Tahun Anggaran | Total Belanja | Realisasi Belanja Operasi | Rasio Belanja Operasi (%) |
|----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2020 | 51.716.860.929.662 | 43.835.699.863.256 | 84,76% |
| 2021 | 61.231.460.250.253 | 53.925.743.776.335 | 88,07% |
| Rata-rata | | | 86,41% |

Sumber : PPID DKI JAKARTA (Diolah 2023)

Berdasarkan hasil analisis rasio belanja operasi terhadap total belanja diperoleh untuk tahun anggaran 2020 sebesar 84,76% dari total belanja daerah sebesar Rp 51.716.860.929.662. Pada tahun anggaran 2021 menunjukkan kenaikan berkisar 3% menjadi 88,07% dari total belanja daerah sebesar Rp 61.231.460.250.253. Dari hasil analisis rata-rata rasio belanja operasi terhadap total belanja menunjukkan lebih dari 85% belanja daerah digunakan untuk pemenuhan belanja operasi.

3.4.2 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Tabel 3. Analisis Belanja Modal TA 2020/2021

| Tahun Anggaran | Total Belanja | Realisasi Belanja Modal | Rasio Belanja Modal (%) |
|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2020 | 51.716.860.929.662 | 3.173.223.520.882 | 6,14% |
| 2021 | 61.231.460.250.253 | 6.865.827.016.719 | 11,21% |
| Rata-rata | | | 8,67% |

Sumber : PPID DKI JAKARTA (Diolah 2023)

Berdasarkan hasil analisis rasio belanja modal terhadap total belanja diperoleh untuk tahun anggaran 2020 sebesar 6,14% dari total belanja daerah sebesar Rp 51.716.860.929.662. Pada tahun anggaran 2021 menunjukkan kenaikan berkisar 5% menjadi 11,21% dari total belanja daerah sebesar Rp 61.231.460.250.253. Dari hasil analisis rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja menunjukkan hampir 9% dari total belanja daerah digunakan untuk belanja modal seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan analisis kinerja belanja daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Analisis rasio pertumbuhan belanja pada Pemprov DKI Jakarta pada periode anggaran 2020-2021 menunjukkan pertumbuhan yang negatif pada tahun 2020 yaitu sebesar -19,32% dan pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,09%.
- Analisis rasio keserasian belanja pada Pemprov DKI Jakarta pada periode anggaran 2020-2021 yang dihitung dari rasio belanja operasi terhadap total belanja memiliki rata-rata sebesar 86,41% yang berarti lebih dari 85% belanja daerah dikonsumsi untuk belanja operasional. Sedangkan persentase rasio belanja modal terhadap total belanja memperoleh rata-rata sebesar 8,67% yang berarti nilainya jauh dibawah proporsi belanja operasional.

REFERENCES

- Abbas, D. S., Eksandy, A., Hidayat, I., & Larasati, N. (2020). Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 154–168. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.146>

- Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Aini, H., Kenamon, M., & Anggraini, Y. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Oku Periode 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 18. <https://doi.org/10.36448/jak.v11i1.1393>
- Aisah, S. (2018). Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010-2016. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(4), 1–16.
- Amelia, S. A. (2022). Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 5(1), 76. <https://doi.org/10.32663/jaz.v5i1.2841>
- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). 2757-Article Text-10472-3-10-20210518. 4(1).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: *Australian Journal of Management*, 16(June 1991), 49–66. <http://aum.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/031289629101600103>
- Fathiyah, F., Sukmana, A., & Majid, H. (2021). Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 117. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.236>
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Haryanto, Sahrudin, & Arifuddin. (2007). Akutansi Sektor Publik. *Perpustakaan Nasional*, 3–251.
- Hasanah, N., & Vidiyastutik, D. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Ecobuss*, 6(2), 26–35.
- Jakarta.bpk.go.id. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diakses pada 27 Maret 2023, dari <https://jakarta.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-dki-jakarta/>
- Jakarta.go.id. (2022, 21 Maret). Visi & Misi. Diakses pada 22 Maret 2023, dari <https://www.jakarta.go.id/visi-misi>
- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1473–1484. <file:///C:/Users/my com/Downloads/12369-24660-1-SM.pdf>
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Palimbongan, R. R. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4), 4888–4897.
- Peraturan Pemerintah Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 1–10.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *Bisma: Jurnal Manajemen*, Vol. 4 No. 2, Bulan Oktober Tahun 2018, 4(2), 136–145.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Septa Soraida. (2021). Analisis Belanja Daerah Di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 54–61. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v1i3.119>
- Setiani, I., & Ismunawan. (2022). Pengaruh Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 261–276.

- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4309>
- Soleh, A. (2015). Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 28–38. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i1.92>
- Syifa, A., Suhendar, D., & Purnama, D. (2021). Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Fiscal Stress Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2), 76–86. <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i2.4965>
- Wirawan Suhaedi. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63–78.